



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi
Pembangunan Daerah

Sistem Informasi
Keuangan Daerah

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2023 KECAMATAN MUARA WIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja (RENJA) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Muara Wis Tahun 2022 – 2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Wis ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Muara Wis Tahun 2023.

Muara Wis, Agustus 2022
Camat Muara Wis

FADHLI ANNUR, S.Pd
NIP. 19710605 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARI

DAFTAR ISI II

BAB I..... 1

P E N D A H U L U A N 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II.....4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah. 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 12

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 21

BAB III26

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEAH26

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 27

BAB IV.....29

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH29

4.1 Program dan Kegiatan..... 29

BAB V.....37

PENUTUP.....37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Muara Wis secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Muara Wis menyusun Renja OPD Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Wis. Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kecamatan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Surat Edaran Bupati No.B-370/BAPP/V.1/065.II/02/2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini adalah Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Muara Wis selama tahun 2023 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Muara Wis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kantor Camat Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Wis Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MUARA WIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja-PD Tahun 2021	Realisasi Renja-PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Kewilayahan									
7 01	Urusan Kecamatan									
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100		100	100	100	100	100	100
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	71,43		71,43	71,43	100	78,5	78,5	100
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	11		1	1	100	2	2	2
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	7200		1200	1200	100	1200	2400	33,33
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100		100	100	100	100	100	100
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	12		2	2	100	2	2	2
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	900		150	150	100	150	300	33,33
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	13		5	5	100	4	9	69,23
7 01 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB		B	B	100	B	B	B

7	01	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131		21	21	100	22	22	22
7	01	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13		3	3	100	2	5	38,46
7	01	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26		6	6	100	4	10	38,46
7	01	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72		12	12	100	12	24	33,33
7	01	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	112		12	12	100	20	20	20
7	01	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	216		36	36	100	36	72	33,33
7	01	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	102		12	12	100	18	30	29,41
7	01	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	92		12	12	100	16	16	16
7	01	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	32		12	12	100	4	16	50,00
7	01	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	300		50	50	100	50	50	50
7	01	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270		20	20	100	50	70	25,93
7	01	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	61		7	7	100	10	10	10
7	01	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	31		6	6	100	5	11	35,48
7	01	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	90		15	15	100	15	30	33,33
7	01	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	90		15	15	100	15	30	33,33
7	01	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12		2	2	100	2	4	33,33
7	01	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12		2	2	100	2	4	33,33
7	01	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2100		100	100	100	400	500	23,81
7	01	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	7200		1200	1200	100	1200	2400	33,33
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang	360		60	60	100	60	60	60

						Diadakan								
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	299		129	129	100	34	163	54,52
7	01	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	72		12	12	100	12	12	12
7	01	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	72		12	12	100	12	24	33,33
7	01	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72		12	12	100	12	24	33,33
7	01	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72		12	12	100	12	24	33,33
7	01	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	252		17	17	100	47	47	47
7	01	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	75		15	15	100	12	27	36,00
7	01	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12		2	2	100	2	4	33,33

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Nilai pagu pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Mengurangi dan menghapus beberapa sub kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

1. Bidang ketenagakerjaan, pelayanan pemberian kartu pendaftaran I(AK/1) kepada pencari kerja;
2. Bidang pekerjaan umum, pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tinggal;
3. Bidang Perhubungan;
4. Bidang pertanahan, pemberian pelayanan melegalisir serta memproses surat pelepasan hak atas tanah di wilayahnya dan mengetahui surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah;
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri, dengan pelayanan pemberian penerbitan izin gangguan usaha (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan kecil;
7. Bidang otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian meliputi pemberian pelayanan pemungutan pendapatan daerah.

Urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan, yang meliputi bidang:

1. Pertanian;
2. Perikanan;
3. Energi dan Sumberdaya Mineral;
4. Pariwisata, pemberian izin usaha pariwisata yang dikelola oleh perseorangan;
5. Perindustrian dan Perdagangan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Wis selama kurun waktu tahun 2021. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Muara Wis, yaitu :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP;
- c. Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan;
- d. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif;
- e. Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- g. Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Wis
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021

Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian	Proyeksi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			81	82	83	84	85	N/A	81
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	N/A	100
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	100	100	100	100	N/A	100
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			5	5,5	6	6,5	7	N/A	5
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			0	0	0	0	0	N/A	0
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			62	64	66	68	70	N/A	62
7	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			100	100	100	100	100	N/A	100
8	Tingkat Akseibilitas Wilayah Kecamatan			78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
9	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100

10	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			0	100	100	100	100	N/A	0
11	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0	100	100	100	100	N/A	0
12	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik			42,8	57,1	71,4	71,4	85,7	42,8	42,8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Wis berpedoman kepada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Yaitu disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selanjutnya mengenai fungsi diuraikan pada pasal berikutnya yaitu di pasal 4 yang berbunyi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

a. Permasalahan dan Hambatan

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Muara Wis dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan adalah:

1) Bidang Pemerintahan

- Belum optimalnya pembinaan aparatur desa
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan
- Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan
- Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku

- Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani keuangan
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan
- 2) Bidang Ekonomi
- Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
 - Adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi.
- 3) Bidang Kesra
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur desa dan/atau kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
 - Minimnya data dan informasi dari desa dan atau kelurahan
- 4) Bidang Aset Pemerintahan
- Minimnya sarana dan prasarana sosial, umum, dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah
- 5) Bidang Pelayanan
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
 - Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP
- b. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Muara Wis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain:
- 1) Terkait dengan adanya wabah covid 19 berpengaruh dengan adanya rasionalisasi anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya.
 - 2) Dengan adanya wabah covid 19 juga berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat karena harus dibatasi agar tidak menimbulkan *cluster* baru.
- c. Tantangan dan Peluang
- Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Wis. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Tersedianya sarana dan prasarana serta dukungan dana yang ada dapat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintahan desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
 - 2) Sumber Daya Manusia yang mempunyai pendidikan yang memadai dan semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
- Sedangkan peluang yang bisa didapatkan adalah :
- 1) Kepemimpinan yang mempunyai jangkauan ke depan (visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang inspiratif.
 - 2) Optimalisasi ketersediaan sumber daya manusia yang ada agar sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja.

d. Formulasi isu-isu penting

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diperoleh isu-isu strategis pada tahun 2023 yang dapat digunakan sebagai penentuan kebijakan penganggaran. Beberapa isu strategis Kecamatan Muara Wis tahun 2023 sebagai tugas dan fungsinya antara lain:

- 1) Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat desa
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan
- 3) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menangani sengketa lahan
- 4) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung kerja aparatatur kecamatan
- 5) Mengikuti bimtek dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM
- 6) Mengusulkan pembangunan di desa melalui musrenbang
- 7) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2023 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

Tabel. T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	
	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Nilai	7.679.813.220	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Nilai	7.910.526.417	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	dokumen	170.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	dokumen	170.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	30.000.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	15.000.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	50.000.000	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Muara Wis	Jumlah Laporan Evaluasi	1	Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat	Muara Wis	Jumlah Laporan Evaluasi	1	Laporan	30.000.000	

	Daerah		Kinerja Perangkat Daerah				Daerah		Kinerja Perangkat Daerah				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20	laporan	3.992.987.114	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14	laporan	4.223.700.311	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Wis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	396	Orang/bulan	3.897.467.114	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Wis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	396	Orang/bulan	4.128.180.311	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	15.000.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan	80.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	80.520.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500	unit	70.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500	unit	70.800.000	
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	30.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	30.000.000	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	40.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	40.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	33	orang	180.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	33	orang	180.000.000	
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Muara Wis	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50	Unit	20.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Muara Wis	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50	Unit	20.000.000	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Wis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50	Paket	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Muara Wis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50	Paket	50.000.000	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Wis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Muara Wis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	50.000.000	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	30.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	30.000.000	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	30.000.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	11	Unit	604.698.146	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	11	Unit	604.698.146	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	7.500.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	32.718.146	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	32.718.146	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Wis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Muara Wis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	20.000.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Muara Wis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	45.000.000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Muara Wis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Muara Wis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	8.000.000	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	Dokumen	8.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	Dokumen	8.600.000	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	27.880.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	20.000.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	Laporan	375.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	Laporan	375.000.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120	Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120	Dokumen	50.000.000	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Wis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	30.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	80	unit	1.640.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	80	unit	1.640.000.000	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	180.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	180.000.000	
05	Pengadaan Mebel	Muara Wis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	150.000.000	Pengadaan Mebel	Muara Wis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	150.000.000	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Wis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Wis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	Unit	200.000.000	
09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	1.110.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	1.060.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	541.327.960	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	541.327.960	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	284.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	284.400.000	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	-	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	251.927.960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Muara Wis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	251.927.960	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	64	unit	480.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	64	unit	480.000.000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Muara Wis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	100.000.000	
05	Pemeliharaan Mebel	Muara Wis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Muara Wis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	Unit	10.000.000	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Wis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Muara Wis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	20.000.000	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	300.000.000	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Muara Wis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	2.065.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	1.893.814.000	
			Tingkat Aksebilitasi Wilayah Kecamatan	78,5	Persen	-			Tingkat Aksebilitasi Wilayah Kecamatan	78,5	Persen	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1	kegiatan	10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1	kegiatan	10.000.000	
02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	1	Laporan	10.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar	Muara Wis	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	1	Laporan	10.000.000	

	Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10	kegiatan	2.055.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	10	kegiatan	1.883.814.000	
02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12	Laporan	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12	Laporan	30.000.000	
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	2.025.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.853.814.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	100.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	125.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12	Kali	100.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12	Kali	125.000.000	
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga	50.000.000	
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	75.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	persen	10.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	100	persen	10.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Kegiatan	10.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Kegiatan	10.000.000	
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	Laporan	10.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	Laporan	10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	100	Persen	200.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	100	Persen	200.000.000	

	UMUM		UMUM				UMUM		UMUM				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	Kegiatan	200.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	Kegiatan	200.000.000	
01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	180	Orang	180.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Muara Wis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	180	Orang	180.000.000	
08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	20.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	385.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	385.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	7	Desa	385.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	7	Desa	385.000.000	
03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Muara Wis	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28	Dokumen	85.000.000	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Muara Wis	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28	Dokumen	85.000.000	
11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Dokumen	250.000.000	
12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4	Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4	Dokumen	50.000.000	
						10.439.813.220						10.524.340.417	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan uu nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif.

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

1. Musrenbang tingkat kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Musrenbang tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka.;
3. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan musrenbang kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD. Minggu II s/d minggu IV bulan Februari);
4. Musrenbang tingkat kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan musrenbang di kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Prioritas 1.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume	Pagu	PD Penanggung Jawab
1	Pembangunan Kantor BPD Baru	Sebemban	8 x 15 Mtr	230.000.000	Kecamatan
2	Pembangunan Gedung kearsipan	Sebemban	4 x 6 Mtr	100.000.000	Kecamatan
3	Lanjutan Pembangunan Pelantaran Kantor Desa	Sebemban	8x30 m	230.000.000	Kecamatan
4	Pemagaran Jalan Jembatan	Sebemban	100 M	200.000.000	Kecamatan
5	Pemagaran Jalan Jembatan	Sebemban	150 M	230.000.000	Kecamatan
6	Pembangunan Jalan Jembatan Tani Kel. Bina Bangun Desa	Sebemban	2x200 M	200.000.000	Kecamatan
7	Pembangunan Jalan Jembatan RT 08	Sebemban	2x200 M	200.000.000	Kecamatan
8	Semenisasi jalan jembatan Gang Keluarga	Sebemban	4x100 m	230.000.000	Kecamatan
9	Semenisasi jalan jembatan Gang Kuang	Sebemban	4x100 m	230.000.000	Kecamatan
10	Semenisasi Gang Masjid	Sebemban	4x100 m	230.000.000	Kecamatan
11	Peningkatan jalan Dusun Kuyung	Sebemban	700 m	230.000.000	Kecamatan
12	Lanjutan Pembangunan Jembatan Menuju Kelompok Kelan Ketapi	Sebemban	4x50 m	200.000.000	Kecamatan
13	Lanjutan Pembangunan Jembatan Gang Rt. 006	Sebemban	4x100 m	230.000.000	Kecamatan
14	Rehab jalan jembatan ulin RT 002	Sebemban	4x100 m	230.000.000	Kecamatan
15	Rehab jalan jembatan ulin RT 04	Sebemban	4x70 m	200.000.000	Kecamatan
16	Rehab jalan jembatan ulin RT 04 Samping Kantor Desa	Sebemban	4x50 m	200.000.000	Kecamatan
17	Rehab jalan jembatan ulin RT 06	Sebemban	4x100 m	200.000.000	Kecamatan
18	Rehab Pelebaran Jembatan Gang Abdul Husen RT 05	Sebemban	4x100m	230.000.000	Kecamatan
19	Rehab jalan jembatan ulin RT 07	Sebemban	4x100m	230.000.000	Kecamatan
20	Rehab jalan jembatan ulin RT 08	Sebemban	4x100m	230.000.000	Kecamatan
21	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Desa Sebemban	Sebemban	1 Unit	200.000.000	Kecamatan
22	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Sebemban	1 Unit	230.000.000	Kecamatan
23	Pembangunan Destinasi Wisata Desa	Sebemban	1 Unit	200.000.000	Kecamatan
24	Pembangunan Kanofi Gedung PKK	Sebemban	5x6M	150.000.000	Kecamatan
25	Pembangunan Lapangan Putsal	Sebemban	1 Unit	230.000.000	Kecamatan
26	Rehab Gedung BPU Desa	Sebemban	1 Unit	230.000.000	Kecamatan
	Jumlah			5.500.000.000	

Prioritas 2

No	Prioritas	Lokasi (Desa/Kel)	Volume	Pagu	PD Penanggung Jawab
1	Pengadaan perahu piber kelompok nelayan Luah Sebemban	Sebemban	25 Unit	250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Pengadaan Mesin Ces KL Nelayan Danau Belejong	Sebemban	20 Bh	80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Pengadaan Mesin Ces KL Nelayan Bangkit Bersama	Sebemban	20 Bh	80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Pengadaan Mesin Ces KL Nelayan Ebos Bersama	Sebemban	33 Bh	80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Pengadaan Keramba Trol + Bibt Ikan Mas & Pakan KL Ebos Bersama	Sebemban	1 Paket	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Pengadaan Budi daya Ikan Lele + Keramba Apung	Sebemban	1 Paket	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Pengadaan kawat bubu penangkap ikan belut	Sebemban	1 Paket	500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Bantuan Keramba Trol + Bibt Ikan Mas & Pakan KL Danau Belejong	Sebemban	1 Paket	80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Bantuan Keramba Trol + Bibt Ikan Mas & Pakan KL Semangat Maju dusun kuyung	Sebemban	1 Paket	80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

10	Bantuan Bibit Ikan dan Pembuatan Kolam. 16000 Ekor & Kolam	Sebemban	16000 Ekor	250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Pengadaan Mesin Ces dan perahu piber Kel. Nelayan Preyan	Sebemban	25 Unit	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Pengadaan Kawat Pengilar Biawan Kelompok Nelayan Preyan	Sebemban	100 pics	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Pengadaan Kawat Pengilar Biawan Kelompok Nelayan Luah Sebemban	Sebemban	100 pics	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Pengadaan Semprotan elektrik CBA Untuk kelompok Gapoktan Bina Karya	Sebemban	250 unit	250.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
15	Pengadaan Kultivator Untuk kelompok Gapoktan Bina Karya	Sebemban	45 Unit	150.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
16	Pengadaan Mesin Rumpuk Untuk kelompok Gapoktan Bina Karya	Sebemban	250 Unit	250.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
17	Pengadaan Pauer Treser Jagung Untuk kelompok Gapoktan Bina Karya	Sebemban	25 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
18	Percetakan Sawah 8 Kelompok Tani Sebemban dan Dusun Kuyung Untuk kelompok Gapoktan Bina Karya	Sebemban/Kuyung	250 Ha	500.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
19	Pengadaan Alat Tanam Jagung Untuk kelompok Gapoktan Bina Karya	Sebemban	45 Unit	80.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
20	Bantuan Traktor Mini Roda Empat Gapoktan Bina Karya	Sebemban	1 Unit	400.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
21	Bantuan Hensplayer Elektrik Kl. Wanita Tani Wanita Mandiri	Sebemban	33 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
22	Bantuan Hensplayer Elektrik Kl. Wanita Tani Subur Makmur 2 (Dua)	Sebemban	33 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
23	Bantuan Hensplayer Elektrik Kl. Wanita Tani Subur Makmur I (Satu)	Sebemban	33 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
24	Bantuan Hensplayer Elektrik Kl. Wanita Tani Ratih Ungu	Sebemban	33 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
25	Bantuan Hensplayer Elektrik Kl. Wanita Tani Anggrek	Sebemban	33 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
26	Bantuan Power Theser KL Tani Usaha Etam	Sebemban	2 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
27	Bantuan Alat Tanam Jagung Gapoktan Bina Karya	Sebemban	8 unit	40.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
28	Pengadaan Mesin Rumpuk Untuk Gapoktan Tani Bina Karya	Sebemban	250 unit	250.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
30	Pengadaan ternak sapi	Sebemban	100 Ekor	700.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
31	pengadaan ternak kambing	Sebemban	100 Ekor	400.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
32	Pengadaan bibit ayam	Sebemban	100 Ekor	30.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
33	Pengadaan Bibit Sayur (Terong, Cabe, Kangkung, Kacang, Timun, Buncis, Lampeng, Jangung Racun Primazon, Racun Suprimo, Racun Curacron, dan Pipuk NPK,) Kelompok Wanita Tani Subur Makmur 1 (Satu) Sebemban	Sebemban	1 Paket	70.000.000	Dinas Perkebunan
34	Pengadaan Bibit Sayur (Terong, Cabe, Kangkung, Kacang, Timun, Buncis, Lampeng, Jangung Racun Primazon, Racun Suprimo, Racun Curacron, dan Pipuk NPK,) Kelompok Wanita Tani Subur Makmur 2 (Dua) Sebemban	Sebemban	1 Paket	70.000.000	Dinas Perkebunan
35	Pengadaan Bibit Sayur (Terong, Cabe, Kangkung, Kacang, Timun, Buncis, Lampeng, Jangung Racun Primazon, Racun Suprimo, Racun Curacron, dan Pipuk NPK,) Kelompok Wanita Tani Wanita Mandiri Sebemban	Sebemban	1 Paket	70.000.000	Dinas Perkebunan
36	Pengadaan Bibit Sayur (Terong, Cabe, Kangkung, Kacang, Timun, Buncis, Lampeng, Jangung Racun Primazon, Racun Suprimo, Racun Curacron, dan Pipuk NPK,) Kelompok Wanita Tani Ratih Ungu	Dusun Kuyung	1 Paket	70.000.000	Dinas Perkebunan
37	Pengadaan Bibit Sayur (Terong, Cabe, Kangkung, Kacang, Timun, Buncis, Lampeng, Jangung Racun Primazon, Racun Suprimo, Racun Curacron, dan Pipuk NPK,) Kelompok Wanita Tani Anggrek	Dusun Kuyung	1 Paket	70.000.000	Dinas Perkebunan
38	Pembukaan dan Pencetakan Sawah	Sebemban	100 Ha	400.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
39	Bantuan Bibit Padi Unggul + kapur Pertanian Gapoktan Bina Karya	Sebemban	4 Ton	50.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
40	Pembangunan Kalang Sapi + Tempat Pakan KL Tanjung Haur	Sebemban	8 m x 28 M	300.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
41	Pemagaran Ternak Sapi KI Tanjung Haur	Sebemban	1000 M	500.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
42	Pembangunan Pagar Ternak Sapi KL Keliran Golong	Sebemban	1000 m	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan

43	Pembangunan Pagar Sapi KL Kelan Ketapi	Sebemban	1000 m	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
44	Pembangunan Atap Kalang Sapi KL Tanjung Haur	Sebemban	4 x 28 M	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
45	Pembangunan Atap Kalang Sapi KI Tanjung Haur	Sebemban	4 x 28 Mtr	200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
46	Pembukaan Lahan dan Bantuan Bibit Sawit dusun kuyung	Sebemban	200 ha	400.000.000	Dinas Perkebunan
47	Pembangunan Perkebunan Sawit 200 Ha	Sebemban/Kuyung	300 Ha	2.000.000.000	Dinas Perkebunan
48	Bantuan Bibit sawit siap Tanam	Sebemban/Kuyung	2.244 pohon	135.000.000	Dinas Perkebunan
49	Pengadaan Bibit Buah-Buahan Untuk Penghijauan Halaman Pekarangan Rumah Penduduk Desa Sebemban	Sebemban/Kuyung	1000 Pohon	20.000.000	Dinas Perkebunan
50	Pengadaan Bibit Pohon untuk Rehabilitasi Lingkungan Danau	Sebemban	5000 Pohon	1.000.000.000	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan
51	Pembangunan Rumah Burung Walet Kelompok Pokja Rt.01	Muara Wis	1 Paket	200.000.000	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan
52	Pembangunan Rumah Burung Walet Kelompok Pokja Rt.02	Muara Wis	1 Paket	200.000.000	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan
53	Pembangunan Rumah Burung Walet Kelompok Pokja Rt.03	Muara Wis	1 Paket	200.000.000	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan
54	Pembangunan Rumah Burung Walet Kelompok Pokja Rt.04	Muara Wis	1 Paket	200.000.000	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan
55	Pembangunan Rumah Burung Walet Kelompok Pokja Rt.05	Muara Wis	1 Paket	200.000.000	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan
56	Pemasangan Jaringan Listrik (PLN)	Dusun Kuyung	10 KM	500.000.000	Dinas Pertambangan & Energi
57	Pembangunan Pelantaran dan Pagar PAUD Mekar indah	Sebemban/Kuyung	8x15 m	800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
58	Pembangunan Pelantaran dan Pagar PAUD Wijaya Kusuma I	Sebemban Rt. 003	4 x 37 M	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
59	Rehab Madrasah Al Amin Dinding dan Lantai	Sebemban	1 Paket	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
60	Pembangunan Pagar Halaman SDN 008	Sebemban	74 M	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
61	Pembangunan Gedung UKS dan Perpustakaan SD 002 Muara Wis	Sebemban	8 x 7 M	270.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
62	Pembangunan Ruang UKS dan Perpustakaan SD 008 Muara Wis	Sebemban	6 M x 8 M	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
63	Pembangunan Pagar Halaman SD 002 Muara Wis	Sebemban	74 M	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
64	Rehab Gedung SD 008 Muara Wis	Sebemban	9x25 M	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65	Rehab Gedung SD 002 Muara Wis	Sebemban	1 Unit	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
66	Pengadaan Meubelair SD 002 Muara Wis	Sebemban	50 Pasang	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67	Pelatihan Peningkatan Peranan Wanita melalui Keluarga Sejahtera (P2WKSS) PKK Desa	Sebemban	1 Paket	50.000.000	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
68	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Miftahul Jannah	Sebemban	1 Paket	300.000.000	Pemkab. Bagian Kesra
69	Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Nur Hidayah	Dusun Kuyung	1 Paket	300.000.000	Pemkab. Bagian Kesra
70	Pengadaan Sarana dan Prasarana Langgar Nurul Ikhsan	Sebemban	1 Paket	200.000.000	Pemkab. Bagian Kesra
71	Peningkatan Jalan Interkoneksi Kecamatan (Dusun Kuyung Ke desa Kayu Batu)	Sebemban	20 Km	50.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
72	Pembangunan Jembatan Beton Sungai Keliran Jambu	Sebemban	8 x 12 M	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
73	Pembangunan Jembatan Beton Sungai Keliran Golong	Sebemban	8 x 12 M	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
74	Pembangunan Jembatan Beton Sungai Mito	Sebemban	8 x 8 M	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
75	Lanjutan Peningkatan jalan poros sebemban ke Dusun Kuyung	Muara Wis	7 KM	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
76	Peningkatan badan Jalan Sebemban Dusun Kuyung	Sebemban	11 Km	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
77	Pembangunan Lapangan Futsal	Dusun Kuyung	1 paket	1.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
78	Pengadaan WC Lapangan Sepak Bola	Sebemban	2 Unit	45.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
79	Pengadaan Peralatan Bola (Sepak Bola)	Sebemban	12 Bh	35.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
80	Pengadaan Mesin Rumput Dorong	Sebemban	2 Unit	15.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
81	Pengadaan Peralatan Bola Voli (Bola, Net, Kostum Latihan, Tiang Besi Lapangan Bola Voli)	Sebemban	1 Paket	25.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
82	Rehab gedung Bulu Tangkis	Dusun Kuyung	1 Paket	500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

83	Pembangunan diorama dan pojok baca	Sebemban	1 Paket	100.000.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
84	Lanjutan Pembangunan Jembatan Pusban ke Jln. Urukan	Sebemban	4 x 4 M	50.000.000	Kecamatan
85	Pembangunan pelataran balai desa	Sebemban	1 Paket	200.000.000	Kecamatan
86	Rehb Berat Langgar Nurul Ikhsan	Sebemban	1 Paket	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
87	Pembangunan Masjid Miftahul Jannah	Sebemban	20x20 M	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
88	Penyelesaian Pembangunan Masjid NUR HIDAYAH dusun kuyung	Dusun Kuyung	15x15 M	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
89	Semenisasi jalan jembatan ulin	Sebemban	3 KM	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
90	Semenisasi Jalan Botoh Abdullah	Sebemban	2x350 M	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
91	Pembersihan Badan jalan Sebemban Dusun Kuyung	Sebemban	15 Km	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
92	Lanjutan Pembangunan Jalan Jembatan Usaha Tani Rt.01	Sebemban	2 x 200	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
93	Semenisasi Jalan Jembatan Desa	Sebemban	4 x 300	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
94	Pembangunan Jln Jembatan Usaha Tani Nelayan Danau Kelacangan	Sebemban	2 X 700 M	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
95	Semenisasi Jalan Jembatan Desa	Sebemban	4 x 300	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
96	Peningkatan SPAM Perdesaan	Sebemban	1 Unit	500.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman
97	Perluasan jaringan perpipaan	Sebemban	1 Paket	500.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman
98	Pembangunan Jembatan Menuju Pengolahan Air Bersih	Sebemban	1 Paket	250.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman
99	Bantuan WC Warga	Sebemban	1 Paket	150.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman
100	Pembangunan WC Umum	Sebemban	1 Paket	250.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman
101	Rehab Rumah Kurang Mampu	Sebemban	25 Unit	500.000.000	Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman
102	Pembangunan Kantor Desa terpadu	Sebemban	1 Paket	2.000.000.000	Dinas Cipta Karya
103	Pembangunan Rumah Tamu + Perlengkapan	Sebemban	6x12 m	250.000.000	Dinas Cipta Karya
104	Pembangunan Dermaga Ponton	Sebemban	1 Unit	500.000.000	Dinas Perhubungan
105	Pembangunan Dermaga SD 007	Melintang	1 Unit	1.200.000.000	Dinas Perhubungan
106	Pembangunan Dermaga Masjid Miftahul Jannah	Sebemban	1 Unit	400.000.000	Dinas Perhubungan
107	Pembangunan Dermaga Masjid Nur Hidayah				Dinas Perhubungan
108	Pengadaan sepeda motor PATWAL LANTAS	Sebemban	1 Unit	50.000.000	Dinas Perhubungan
109	Pemasangan Petunjuk Arah Lalu Lintas	Sebemban	1 Paket	30.000.000	Dinas Perhubungan
110	Pembersihan Pengerukan Sungai Ebos Ke Danau Kelancangan	Sebemban	5 Km	1.000.000.000	Dinas Perhubungan
111	Pembersihan Pengerukan Sungai Keliran Jambu Ke Danau Melintang	Sebemban	5 Km	1.000.000.000	Dinas Perhubungan
112	Lanjutan Pembangunan Jalan Jambatan Tani Bina Bersama Rt.01 Desa Sebemban	Sebemban	2 X 200 M	200.000.000	Kecamatan
113	Pembangunan Jalan Jembatan Titian Tani RT.02 Desa Sebemban	Sebemban	2 x 200 M	200.000.000	Kecamatan
114	Pembangunan Jalan Jembatan Tani KL Bina Bangun Desa Sebemban	Sebemban	2x200 M	200.000.000	Kecamatan
115	Pembangunan Jalan Jembatan Rt.08 Desa Sebemban	Sebemban	2x200 M	200.000.000	Kecamatan
116	Lanjutan Pembangunan Jembatan Tani usaha Bersama	Sebemban	2 x 200 Mtr	500.000.000	Kecamatan
117	Lanjutan semenisasi gang keluarga	Sebemban	4x80 M	230.000.000	Kecamatan
118	Lanjutan semenisasi gang SD	Sebemban	4x80 M	230.000.000	Kecamatan
119	Semenisasi Jalan Jembatan Gang Kuang	Sebemban	4 x 80 M	230.000.000	Kecamatan
120	Semenisasi Gang bunghur Rt.02 Desa Sebemban	Sebemban	4 x 100 M	200.000.000	Kecamatan
121	Lanjutan Semenisasi Jembatan Gang Rt. 07 Desa Sebemban	Sebemban	4 x 80 mtr	400.000.000	Kecamatan
122	Lanjutan Pembangunan Jembatan Gang Rt. 06	Sebemban	4x100 m	200.000.000	Kecamatan
123	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dusun kuyung	Sebemban	1 Unit	230.000.000	Kecamatan
124	Rehab BPU Desa Sebemban	Sebemban	1 unit	230.000.000	Kecamatan
125	Pembangunan Gedung Karang Taruna untuk Penyimpanan Alat Pemuda. 6 x 8 Meter Desa Sebemban	Sebemban	6 x 8 mtr	230.000.000	Kecamatan
126	Pengadaan Mesin dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Sebemban	2 Unit	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Bidang Insfrastruktur				116.205.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 – 2025. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa bakti tahun 2021 – 2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 - 2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2010 tentang RPJPD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dok perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan RPKD, yang merupakan Rencana Pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam Priode 2022 – 2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan. Maka untuk itu Tujuan strategis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel”

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah :

“Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan”

Tabel 3.1

Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Muara Wis merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Muara Wis sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Muara Wis diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Muara Wis merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.
 - b) Pencapaian SDGs.
 - c) Pengentasan kemiskinan.
 - d) Pencapaian SPM.
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 adalah 6 Program dengan 14 Kegiatan dan 50 sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Muara Wis sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Muara Wis dan melingkupi semua Desa.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja Kecamatan Muara Wis sebesar Rp. 10.524.340.417,00.
- c. Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format table berikut ini:

Tabel. T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Muara Wis

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					UNSUR KEWILAYAHAN							
					KECAMATAN							
7	01	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		62 Nilai	7.910.526.417		64 Nilai	7.679.813.220
7	01	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19 dokumen	170.000.000		19 dokumen	170.000.000
7	01	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Muara Wis	2 Dokumen	30.000.000		2 Dokumen	30.000.000
7	01	01.	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Muara Wis	1 Dokumen	15.000.000		1 Dokumen	15.000.000
7	01	01.	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Muara Wis	1 Dokumen	15.000.000		1 Dokumen	15.000.000
7	01	01.	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Muara Wis	1 Dokumen	15.000.000		1 Dokumen	15.000.000
7	01	01.	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Muara Wis	1 Dokumen	15.000.000		1 Dokumen	15.000.000

7	01	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muara Wis	12 Laporan	50.000.000		12 Laporan	50.000.000
7	01	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Muara Wis	1 Laporan	30.000.000		1 Laporan	30.000.000
7	01	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		20 laporan	4.223.700.311		20 laporan	3.992.987.114
7	01	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Muara Wis	396 Orang/bulan	4.128.180.311		396 Orang/bulan	3.897.467.114
7	01	01.	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Muara Wis	1 Laporan	15.000.000		1 Laporan	15.000.000
7	01	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Muara Wis	18 Laporan	80.520.000		18 Laporan	80.520.000
7	01	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		500 unit	70.800.000		500 unit	70.800.000
7	01	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	4 Laporan	30.000.000		4 Laporan	30.000.000
7	01	01.	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Muara Wis	12 Laporan	40.800.000		12 Laporan	40.800.000
7	01	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian		33 orang	180.000.000		33 orang	180.000.000
7	01	01.	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Muara Wis	50 Unit	20.000.000		50 Unit	20.000.000
7	01	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Muara Wis	50 Paket	50.000.000		50 Paket	50.000.000
7	01	01.	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Muara Wis	50 Orang	50.000.000		50 Orang	50.000.000

					Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan						
7	01	01.	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	50 Orang	30.000.000		50 Orang	30.000.000
7	01	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Muara Wis	50 Orang	30.000.000		50 Orang	30.000.000
7	01	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		11 Unit	604.698.146		11 Unit	604.698.146
7	01	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Muara Wis	5 Paket	7.500.000		5 Paket	7.500.000
7	01	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Muara Wis	20 Paket	32.718.146		15 Paket	32.718.146
7	01	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Muara Wis	6 Paket	20.000.000		6 Paket	20.000.000
7	01	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Muara Wis	15 Paket	45.000.000		15 Paket	45.000.000
7	01	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Muara Wis	8 Paket	8.000.000		2 Paket	8.000.000
7	01	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Muara Wis	4 Dokumen	8.600.000		2 Dokumen	8.600.000
7	01	01.	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Muara Wis	24 Laporan	20.000.000		24 Laporan	20.000.000
7	01	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Muara Wis	240 Laporan	375.000.000		40 Laporan 0	375.000.000
7	01	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Muara Wis	120 Dokumen	50.000.000		1200 Dokumen	50.000.000
7	01	01.	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Muara Wis	1 Dokumen	30.000.000		1 Dokumen	30.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		80 unit	1.640.000.000		80 unit	1.640.000.000

7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Muara Wis	1 Unit	180.000.000		1 Unit	180.000.000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Muara Wis	20 Unit	150.000.000		20 Unit	150.000.000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Muara Wis	34 Unit	200.000.000		34 Unit	200.000.000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muara Wis	5 Unit	1.060.000.000		5 Unit	1.060.000.000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Muara Wis	1 Unit	50.000.000		1 Unit	50.000.000
7	01	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 bulan	541.327.960		12 bulan	541.327.960
7	01	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Muara Wis	12 Laporan	5.000.000		12 Laporan	5.000.000
7	01	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Muara Wis	12 Laporan	284.400.000		12 Laporan	284.400.000
7	01	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Muara Wis	12 Laporan	251.927.960		12 Laporan	251.927.960
7	01	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		64 unit	480.000.000		64 unit	480.000.000
7	01	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Muara Wis	12 Unit	100.000.000		12 Unit	100.000.000
7	01	01.	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Muara Wis	5 Unit	10.000.000		5 Unit	10.000.000
7	01	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Muara Wis	50 Unit	20.000.000		50 Unit	20.000.000
7	01	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muara Wis	2 Unit	300.000.000		2 Unit	300.000.000

7	01	01.	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Muara Wis	1 Unit	50.000.000		1 Unit	50.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		100 Persen	1.893.814.000		100 Persen	2.065.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		1 Kegiatan	10.000.000		1 Kegiatan	10.000.000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	1 Laporan	10.000.000		1 Laporan	10.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		10 Kegiatan	1.883.814.000		10 Kegiatan	2.055.000.000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Muara Wis	12 Laporan	30.000.000		12 Laporan	30.000.000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Muara Wis	12 Laporan	1.853.814.000		12 Laporan	2.025.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		100 Persen	125.000.000		100 Persen	100.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		12 Kali	125.000.000		12 Kali	100.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Muara Wis	5 Lembaga	50.000.000		5 Lembaga	50.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Muara Wis	1 Laporan	75.000.000		1 Laporan	50.000.000

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		100 persen	10.000.000		100 persen	10.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Kegiatan	10.000.000		1 Kegiatan	10.000.000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Muara Wis	12 Laporan	10.000.000		12 Laporan	10.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 Persen	200.000.000		100 Persen	200.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		1 Kegiatan	200.000.000		1 Kegiatan	200.000.000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Muara Wis	180 Orang	180.000.000		180 Orang	180.000.000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Muara Wis	12 Dokumen	20.000.000		12 Dokumen	20.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		100 Persen	385.000.000		100 Persen	385.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi		7 Desa	385.000.000		7 Desa	385.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Muara Wis	7 Dokumen	85.000.000		7 Dokumen	85.000.000

					Desa	Pendayagunaan Aset Desa						
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Muara Wis	1 Dokumen	250.000.000		1 Dokumen	250.000.000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Muara Wis	2 Dokumen	50.000.000		2 Dokumen	50.000.000
									10.524.340.417			10.439.813.220

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Muara Wis. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Muara Wis di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.
 - b. Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.
- C. Rencana Tindak Lanjut. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Muara Wis. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Muara Wis Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Muara Wis juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Muara Wis ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Muara Wis serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Muara Wis, Agustus 2022

Camat Muara Wis



FADHLI ANNUR, S.Pd

NIP. 19710605 199603 1 004